Bantu Penanganan Covid-19, Jokowi Apresiasi Peran MUI

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Milad ke-46 Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara virtual. Kepala Negara mengucapkan terima kasih kepada wadah ormas Islam itu yang telah membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19.

"Pemerintah juga sangat mengapresiasi setinggi-tingginya atas tausiyah MUI yang mengimbau agar umat Islam menjadi pelopor dalam mengatasi pandemi Covid-19. Hal ini mencerminkan komitmen luhur MUI untuk menjaga keselamatan jiwa dan kemaslahatan bersama," kata Jokowi, Senin (26/7).

Menurut Jokowi, MUI telah banyak memberikan sumbangsih untuk kemajuan bangsa. Selain itu, organisasi ini juga selalu memberikan bantuan moral dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan, khususnya dalam menampilkan wajah moderasi beragama dan istikamah berdakwah, serta menyemai nilai persaudaraan dan toleransi.

Jokowi mengatakan hingga kini pandemi Covid-19 belum berakhir. Bahkan masa-masa sulit ini dikhawatirkan akan lebih panjang dari perkiraan karena munculnya varian-varian virus corona lainnya.

"Namun saya meyakini dengan doa para ulama dan ikhtiar yang sungguh-sungguh kita akan mampu melewati ujian yang sedang kita alami saat ini," jelasnya.

"Atas nama pemerintah, masyarakat bangsa dan negara saya mengucapkan selamat Milad ke-46 kepada Majelis Ulama Indonesia," tambah Jokowi.

Dalam acara itu turut hadir Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang juga Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar, beserta perwakilan ormas-ormas Islam yang menjadi anggota MUI.

Jokowi mengatakan, berdasarkan informasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, pandemi Covid-19 akan berlangsung lebih lama dari perkiraaan. Hal itu disebabkan munculnya varian baru virus ini yang lebih menular.

"Sebagaimana kita ketahui sampai saat ini pandemi belum juga berakhir, bahkan beberapa hari yang lalu WHO menyampaikan diperkirakan akan muncul lagi varian-varian baru dan hal itu bisa menyebabkan pandemi akan lebih panjang dari yang kita perkirakan," katanya.

Namun, Jokowi meyakini bangsa Indonesia akan mampu melewati masa-masa sulit ini karena ada doa dan dukungan dari para ulama dan kiai.

"Saya meyakini dengan doa para ulama dan ikhtiar yang sungguh-sungguh kita akan mampu melewati ujian yang sedang kita alami saat ini," tuturnya.

Kunci untuk menang dari Covid-19, kata Jokowi yakni mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi. Dengan begitu kekebalan komunal akan segera terwujud.

"Karena itu saya berharap dukungan dan bantuan MUI mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah untuk mengajak umat mematuhi protokol kesehatan baik di dalam rumah maupun di luar rumah, memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar tentang vaksin," terang Jokowi.

Dalam acara itu turut hadir Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang juga Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar, beserta perwakilan ormas-ormas Islam yang menjadi anggota MUI. ● **han**

IDN/ANTARA

PENYESUAIAN ATURAN PPKM UNTUK USAHA KULINER

Sejumlah warga menyantap sajian yang dijual salah satu warung makan di Kemayoran, Jakarta, Senin (26/7). Pemerintah menyesuaikan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 pada pelaku usaha kuliner dengan mengizinkan warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya untuk buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00, menerima maksimal pengunjung makan di tempat tiga orang dan waktu makan maksimal 20 menit.

Kejagung Bekuk Terpidana Kasus Penipuan yang Buron Sejak 2019

JAKARTA (IM) - Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Agung menangkap seorang buron terpidana kasus penipuan, Teuku Meurah Hasrul, Senin (26/7) pagi. Teuku Meurah ditangkap di Jalan Cirendeu Indah I, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Ia merupakan buronan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak 2019.

"Terpidana Teuku Meurah Hasrul diamankan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, karena ketika dipanggil untuk melaksanakan hukuman oleh jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Senin (26/7).

"Karena itu, yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO)," ujarnya.

Leonard menjelaskan, Teuku Meurah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang menyebabkan korban menderita kerugian Rp 3,17 miliar. Hal itu diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2019 yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. "Terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun," ujarnya.

Ia pun mengimbau para DPO kejaksaan lainnya untuk segera menyerahkan. Leonard menegaskan tidak ada tempat yang aman bagi para buronan. ● **mei**

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Komisaris **PT NOVA SEKURITAS** berkedudukan di Jakarta (**"Perseroan"**) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Senin tanggal 16 Agustus 2021
Waktu : Jam 10.00 WIB
Tempat : Jalan Tanah Abang II Nomor 87 F, Cideng, Jakarta Pusat

Agenda Rapat:
1. Operasional Perseroan
2. Dll

Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal diadakannya Rapat.

Demikian Panggilan ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 27 Juli 2021
Dewan Komisaris
PT NOVA Sekuritas

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT. PLYMILINDO PERDANA

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Pertama PT Plymilindo Perdana, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perseroan**") pada tanggal 16 Juli 2021 dan ternyata tidak memenuhi kuorum, maka Direksi Perseroan mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri menghadiri Rapat Kedua yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu Tanggal 04 Agustus 2021
Waktu : 10,00 wib
Tempat : Kantor Perseroan Rukan Permata Senayan Blok E No. 38 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 12210

Dengan agenda Rapat yang sama dengan Rapat Pertama yaitu:
1. Pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
2. Penerimaan dan Persetujuan Atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Persetujuan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2021 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
6. Persetujuan rencana kerja dan anggaran Perseroan untuk tahun buku 2021.
7. Penetapan remunerasi dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
8. Dan lain-lain.

Catatan:
- Para Pemegang Saham diharapkan hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu Rapat yang telah ditentukan ;
- Para Pemegang Saham dimohon hadir dalam Rapat dengan membawa asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan menyerahkan Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada petugas pendaftaran ;
- Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan memberikan asli surat kuasa, dengan ketentuan 1 (satu) orang pemegang saham (dengan mengabaikan jumlah saham) hanya dapat diwakili oleh 1 (satu) orang Penerima Kuasa dan TIDAK dapat diberikan kuasa substitusi. Penerima Kuasa yang hadir dimohon untuk menyerahkan asli surat kuasa dengan penegasan jumlah saham yang diwakilkan dan serta melampirkan Foto Copy KTP Pemberi Kuasa dan asli KTP Penerima Kuasa kepada petugas pendaftaran.

Jakarta, 27 Juli 2021
Direksi Perseroan

IDN/ANTARA

PEMBERANGKATAN SATGAS KARTIKA JALA KRIDA

Panglima Koarmada II Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto (kanan) berbincang dengan Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) Mayor Jenderal (Mar) Nur Alamsyah (kiri) usai melepas keberangkatan Satgas Kartika Jala Krida Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan ke-68 bersama KRI Bima Suci di Dermaga Madura, Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Senin (26/7). KRI Bima Suci yang akan berlayar selama 99 hari tersebut secara khusus untuk melatih Taruna-Taruni Akademi Angkatan Laut (AAL) mempraktekan ilmu navigasi astronomi.

PPKM Level 4 Diperpanjang Lagi, Anggota DPR: Hindari Asal Bapak Senang

Pemerintah diminta mengumumkan secara jelas ketercapaiannya dalam penanganan pandemi Covid-19 secara real time per hari secara nasional melalui saluran komunikasi yang mudah diakses masyarakat.

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah fokus dan serius mengendalikan pandemi setelah menyatakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021.Menurutnya, dalam pengendalian pandemi itu, pemerintah juga harus menghindari manajemen "asal Bapak senang (ABS)".

"Perpanjangan PPKM Level 4 menunjukkan usaha pemerintah untuk menekan laju persebaran Covid-19. Pemerintah harus fokus dan serius menjalankan PPKM, hindari prinsip manajemen asal bapak senang," kata Netty dalam keterangannya, Senin (26/7).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah agar memperhatikan sejumlah pekerjaan rumah (PR) dan catatan besar terkait proses manajemen pengendalian pandemi. Pertama, pemerintah perlu melakukan testing dan tracing yang lebih masif.

"Penurunan kasus per 25 Juli bukan berarti usaha penanganan pandemi telah berhasil, karena angka itu disertai oleh jumlah testing yang juga jauh menurun," ujarnya.

Netty berpendapat, dalam aspek tracing, Indonesia masih jauh dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyarankan tracing minimal 30 orang per 1 kasus positif. Padahal, pada Februari 2021 Menteri Kesehatan (Menkes) menargetkan tracing 30 orang per 1 kasus.

"Namun terus menurun menjadi 15 orang pada PPKM Darurat," ujarnya.

Kedua, kata Netty, pemerintah harus memastikan pasien isolasi mandiri (isoman) terpenuhi kebutuhannya hingga sembuh. Ia mengingatkan pemerintah bahwa banyak pasien Covid-19 yang terpaksa isoman lantaran penuhnya kapasitas Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan (faskes) lainnya.

"Pasien terpaksa isoman karena over kapasitas faskes mulai dari puskesmas hingga RS. Jangan sampai kasus kematian pasien isoman terus meningkat akibat kurang pemantauannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Netty meminta pemerintah agar menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh faskes seperti obat terapi Covid-19, oksigen, dan ventilator.

"Pemerintah harus mengumumkan secara jelas ketercapaiannya real time per hari secara nasional melalui saluran komunikasi yang mudah diakses," ujarnya.

Terkait jaminan pelindungan dan hak tenaga kesehatan, Netty meminta pemerintah agar memastikan tidak ada lagi penundaan pencairan insentif dan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD).

Terkait restriksi mobilitas, tambah Netty, harus juga diimbangi dengan menggalakkan percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity.

"Perbanyak sentra vaksinasi untuk mencegah penumpukan massa saat vaksinasi serta permudah dan perluas aksesnya bagi masyarakat. Respons hoaks dan misinformasi tentang vaksin dengan informasi ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami," katanya.

Terakhir, Netty mengingatkan pemerintah agar memastikan ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat terdampak PPKM. Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah agar penyaluran bantuan sosial (bansos) secara tepat waktu dan tepat sasaran.

"Pastikan pangan aman dan terkendali melalui operasi pasar murah. Dan jangan ada lagi moral hazard dalam penyaluran dana bansos," kata Netty.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM Level 4 yang berakhir pada Minggu (25/7). Kebijakan itu diperpanjang terhitung sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Keputusan tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu (25/7/2021) malam.

"Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden. ● **han**

Mahfud MD: Kritik Penanganan Covid-19 Boleh tapi Apapun Harus Dimusyawarahkan

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengaku heran masih ada tokoh yang kerap memprovokasi masyarakat agar tidak mau menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan adalah kebersamaan agar bisa lolos dari pandemi Covid-19.

Mahfud mempersilakan masyarakat mengkritik pemerintah terkait penanganan Coglvid-19. Hanya saja langkah tersebut jangan sampai membuat pemerintahan lumpuh. "Masih ada tokoh yang belum disiplin dan melakukan provokasi dan tidak mau menerapkan protokol kesehatan. Ini mohon para tokoh memberi pengertian ya," kata Mahfud saat menghadiri silaturahim virtual dengan alim ulama, pengasuh pondok pesantren, ormas Islam, dan pimpinan lembaga keagamaan se-Jawa Barat, Minggu (25/7).

Mahfud mempersilakan masyarakat mengkritik pemerintah atau memberikan masukan lainnya. Namun ia mengingatkan langkah yang diambil rakyat tersebut jangan sampai membuat pemerintahan lumpuh.

"Tarolah pemerintah perlu dikritik, kritik, silakan, aspirasi boleh dimasukkan kepada pemerintah, aspirasi apapun, tapi ingat Indonesia ini adalah penganut ahlusunnah wal jamaah, ya jangan sampai menyebabkan pemerintahan lumpuh," ucap Mahfud.

Mahfud mengambil kutipan pernyataan ulama besar Imam Nawawi yang menyatakan jangan melawan pemerintah yang sah kecuali melalui proses yang demokratis. "Karena setiap perlawanan secara tidak benar, secara melawan hukum, kata Imam Nawawi, itu hasilnya akan menyengsarakan rakyat," jelas Mahfud.

Pemerintah, kata dia, sangat berhati-hati dalam melayani rakyat. Begitu juga rakyat harus berhati-hati dan membantu pemerintah dalam persoalan kebangsaan, dalam konteks ini adalah pandemi Covid-19. "Karena suatu negara pasti perbedaan banyak, lalu dikatakan dalam fikih dalam perbedaan yang banyak itu lalu dimusyawarahan, apa keputusannya, dilaksanakan pemerintah," tutur Mahfud.

Jagan Panik

Mahfud mengajak alim ulama, pengasuh pondok pesantren, ormas Islam, dan pimpinan lembaga keagamaan untuk membantu masyarakat agar tidak panik akan adanya Covid-19. "Bantu masyarakat tidak panik dan mulai dari kita untuk tidak panik. Anggap saja itu penyakit biasa," katanya.

Menurut Mahfud, salah satu kunci kesembuhan adalah perasaan tenang. Kepanikan dianggap hanya akan memperparah penyakit yang ada. "Banyak penyakit selama ini dan kita bisa menyembuhkannya kalau kita tenang, karena kita menganggap penyakit itu biasa ya biasa saja," ucapnya.

"Kita yang harus membuat hati masyarakat tenang arena kata Ibnu Rusyd, kesembuhan itu separuh diberikan oleh ketenangan, kepanikan itu separuh dari penyakit, pintu kesembuhan itu adalah kesabaran," lanjut Mahfud.

Menurut Mahfud, saat ini kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam penanganan Covid-19. Tokoh agama, tokoh masyarakat, ilmuwan, dan lain sebagainya diharapkan bisa menjadi motor penggerak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan demi menekan jumlah korban.

Namun demikian, Mahfud mengungkapkan saat ini masih ada tokoh agama, ilmuwan hingga dokter yang nyeleneh mengatakan tentang pandemi Covid-19. Misalnya saja mereka menyebut penanganan corona oleh pemerintah salah, menganggap penggunaan masker tidak perlu, hingga menganggap virus ini hasil konspirasi.

Mahfud berujar masih ada tokoh agama yang belum disiplin protokol kesehatan dan melakukan provokasi. Karenanya Mahfud meminta para tokoh dapat memberikan pengertian agar tidak bersikap seperti itu lagi. Pasalnya masyarakat pasti akan mencontoh tokoh tersebut. "Masih ada tokoh yang belum disiplin dan melakukan provokasi dan tidak mau menerapkan protokol kesehatan. Ini mohon para tokoh memberi pengertian," tandasnya. ● **han**

IDN/ANTARA

BANYAKNYA KEMATIAN AKIBAT COVID-19 DISEBABKAN BELUM DIVAKSIN

Pedagang pasar saat disuntikan vaksin COVID-19 di Cibinong Square, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (26/7). Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono mengatakan 94 persen kematian akibat COVID-19 terjadi karena belum divaksin, vaksinasi sejatinya memberikan respon imun yang baik bagi tubuh manusia.

Pemerintah Siapkan Pelacak Digital Terkait Vaksinasi dan Tes PCR

JAKARTA (IM) - Pemerintah tengah menyiapkan sistem pelacakan (tracing) digital melalui aplikasi PeduliLindungi. Dengan sistem tersebut, seseorang yang sudah divaksin ataupun bebas dari virus corona menurut hasil tes PCR dapat diketahui melalui QR code.

"Akan mengoptimalkan digital tracing yaitu sistem aplikasi PeduliLindungi ini akan di-upgrade," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Minggu (25/7).

"Sehingga menggunakan QR code bisa memindai mereka yang sudah tervaksinasi dan juga yang sudah dites PCR," tuturnya.

Menurut Airlangga, nantinya sistem apilkasi PeduliLindungi akan diintegrasikan dengan pusat perbelanjaan atau mal dan merchant. Sehingga, proses screening atau pemindaian akan menjadi lebih mudah.

Airlangga mengatakan, aplikasi PeduliLindungi akan dihubungkan dengan sistem di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). "Ini diharapkan pada saat nanti akan ada pembukaan di tempat-tempat umum, diharapkan program PeduliLindungi ini bisa go live, bisa disiapkan," ujarnya.

Ke depan pemerintah juga akan terus meningkatkan ketersediaan oksigen untuk kebutuhan pasien Covid-19, utamanya di luar Pulau Jawa. Langkah itu ditempuh menyusul lonjakan kebutuhan oksigen medis akibat tingginya penambahan kasus Covid-19.

"Namun untuk di daerah perbatasan itu antara lain di Kalimantan Barat atau Kalimantan Utara pemerintah akan memberikan kemudahan untuk impor oksigen dan ini akan segera dibuatkan regulasi yang menyederhanakan," ucap Airlangga.

Pemerintah, lanjut Airlangga, juga akan mempermudah izin impor bahan baku obat-obatan perawatan Covid-19. Hal ini untuk meningkatkan persediaan obat dalam negeri.

"Kemudahan impor bahan baku juga dipersiapkan, demikian pula obat-obatan baik itu pada perusahaan yang di bidang farmasi baik itu BUMN maupun swasta yang mempunyai izin impor," katanya.

Sebagaimana diketahui, pandemi virus corona di Indonesia masih menunjukkan pemburukan kondisi. Selama sebulan terakhir kasus Covid-19 meningkat drastis, bahkan di kisaran angka 30.000-50.000 kasus per hari. Data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pada Minggu (25/7) menunjukkan, ada 38.679 kasus baru virus corona. Angka itu menyebabkan kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 3.166.505 kasus terhitung sejak awal pandemi pada 2 Maret 2020. Sementara, angka kasus aktif mencapai 573.908 kasus. ● **mei**

PENGUMUMAN

Direksi PT Kerry Nex Express, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Harapan II No. 5, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Indonesia ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 85 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perseroan telah setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yang mana penyetoran atas saham untuk peningkatan modal tersebut dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham ("**Peraturan Pemerintah No. 15/1999**").

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15/1999.

Jakarta, 27 Juli 2021
PT Kerry Nex Express
Direksi